

SOAL KASUS PERUNDUNGAN DI TASIKMALAYA

Arist Merdeka Sirait Sebut Wagub Jabar Gagal Paham

TASIKMALAYA (IM)- Ketua Komisi Nasional (Komas) Perlindungan Anak (PA), Arist Merdeka Sirait menegaskan, kasus perundungan anak sampai meninggal di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, adalah bentuk kekerasan anak dan bukan lelucon atau candaan.

Dirinya menentang pernyataan Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, yang menyebut kasus seperti itu sudah biasa di kalangan masyarakat ke anak dan dianggap sebagai lelucon. Apalagi kasus ini sedang menjadi perhatian masyarakat seluruh Indonesia dan tidak sah seorang pimpinan Jawa Barat sekaligus wilayah lokasinya beranggapan demikian.

Pihaknya justru sepakat dengan pernyataan Presiden RI Joko Widodo yang berupaya agar kejadian tersebut tak terulang. "Saya kira ini Wagub Jabar (Uu Ruzhanul Ulum) gagal paham menilai bentuk-bentuk kekerasan yang ada di tengah masyarakat," jelas Arist, Senin (25/7).

"Pernyataan wagub itu harus ditarik yang menyatakan kasus bully diduga oleh anak dengan korban anak sebagai lelucon (candaan) dan itu biasa di tengah kehidupan anak-anak. Tidak boleh itu dilakukan oleh wagub, karena sudah kekerasan terhadap anak," tambah dia. Arist mengungkapkan, saat

ini pihaknya menunggu hasil penyelidikan Kepolisian terkait kepastian penyebab korban yang meninggal akibat perundungan. Jika nantinya tidak terbukti akibat depresi, lanjut Arist, pimpinan daerah tetap tidak boleh memiliki pemikiran seperti itu terhadap penyelesaian permasalahan anak.

"Sekalipun ini tidak (terbukti akibat depresi), itu tidak boleh (penilaian wagub Jabar). Karena permasalahan anak itu bukan guayonan dan jangnan," beber dia.

Komnas PA pun meminta Wagub Jabar segera menarik ucapannya terkait penilaian tentang penyelesaian permasalahan anak apalagi kasus asusila, kekerasan salah satunya perundungan atau bullying.

"Saya mohon dengan sangat, Wagub Jabar untuk menarik statemen itu, karena akan membuat anak-anak itu menilai kejadian seperti ini sebagai guayonan dan dianggap lucu-lucuan saja," tambah dia.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, mengaku mendapatkan tugas dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, menemui keluarga korban bocah meninggal akibat perundungan. Korban dipaksa menyertahi kucing di Kantor KPAID Kabupaten Tasikmalaya, Sabtu (23/7). ● **pra**

Tuntut Diangkat Sebagai PPPK, Puluhan Guru di Jabar Turun ke Jalan

BANDUNG (IM)- Sejumlah guru SMA, SMK dan SLB di Jawa Barat melakukan aksi di halaman depan Gedung Sate, Senin (25/7).

Para guru yang melakukan aksi damai itu menuntut, dari 10 ribu guru yang sudah lulus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Jawa Barat, mereka belum mendapatkan informasi untuk segera diangkat sebagai PPPK. "Puluhan guru PNS di Jawa Barat serentak akan pensiun, seperti guru inpres, bahkan guru SMAN 9 Bandung tahun ini ada 11 orang guru yang pensiun," ujar Ketua Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Jawa Barat, Iwan Hermawan.

Menurutnya, ketika kehilangan guru itu menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk menempatkan dan mengganti guru tersebut. Dia menambahkan, kasihannya kepada mereka, jangan sekolah yang mencari guru, mereka saja yang

ditempatkan sekolah-sekolah yang guru-gurunya pensiun, sesuai dengan mata pelajarannya.

"Jadi sekali lagi, ini persoalannya, kenapa tidak diangkat, tidak ada tanggung jawab pemerintah pusat," ucapnya.

Tetapi solusinya, kata Iwan, angkat saja mereka di sekolah negeri, beri gaji sesuai dengan gaji standar yang diberikan oleh pemerintah Jawa Barat, sekitar Rp5 juta perbulan, sambil menunggu proses. "Tapi bagi saya, yang penting segera cabut moratorium rekrutmen guru PNS. Yang pensiun terus menerus, tapi tidak ada rekrutmen guru PNS. Jadi ada 4 tuntutan, pertama angkat jadi PNS, kalau gagal jadi PNS mereka angkat P3K, gagal P3K, kasih sertifikasi, kasih sertifikasi, gaji lah sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Regional (UMR) dan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK). ● **pur**



RENCANA PELEBARAN JALAN DI SIDOARJO

Warga membongkar lapak bangunan yang terkena proyek pelebaran jalan di kawasan Aloha, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (25/7). Proyek pelebaran Jalan di Bundaran Aloha, Gedangan-Waru dengan panjang 185 m dan total jalan yang dilebarkan sepanjang 225 meter di lahan seluas 4392 meter persegi tersebut untuk menciptakan tata kota yang lebih nyaman dan mengurai kemacetan.

Pemkab Serang Raih Penghargaan Kabupaten Layak Anak dari Menteri PPPA

JAKARTA (IM)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang kembali meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) Republik Indonesia. Untuk tahun 2022, penghargaan naik tingkat dari sebelumnya tahun 2021 kategori Pratama menjadi Madya. "Penghargaan ini adalah simbolis bagi kita semua, untuk terus memberikan rasa nyaman, aman, dan bahagia untuk seluruh anak," ujar Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah dalam keterangannya, Senin (25/7).

Tatu menyampaikan terima kasih kepada Kemen-PPPA atas penghargaan yang diberikan. "Terima kasih kepada semua yang terlibat dan bersinergi dalam menciptakan Kabupaten Serang sebagai daerah layak anak," ungkapnya.

Penyerahan penghargaan dilakukan Menteri PPPA RI, I Gusti Ayu Bintang Darmawati di Kabupaten Bogor Jawa Barat, Jumat (22/7) malam, yang diikuti secara virtual oleh kabupaten dan kota peraih peringkat tingkat Pratama dan Madya.

Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Kabupaten Serang, Tarkul Wasyit mengatakan

kenaikan peringkat KLA sesuai hasil penilaian verifikasi lapangan oleh Kemen-PPPA.

"Hal ini adalah salah satu bukti bahwa gugus tugas KLA Kabupaten Serang sudah bekerja sama secara maksimal dan bersinergi," ujarnya.

Tarkul mengatakan, sesuai mandat undang-undang, setiap daerah harus melaksanakan pengembangan KLA. Kemudian beberapa aspek yang sudah dilakukan Kabupaten Serang mulai dari kelembagaan sampai dukungan kebijakan dan anggaran. Secara regulasi, sudah ada regulasi dari mulai Peraturan Bupati (Perbup) hingga membuat Peraturan Daerah (Perda) terkait KLA di 2022 ini. "Berdasarkan penilaian lapangan bahwa semua gugus tugas sudah bekerja bersama-sama, sehingga tim dari pusat menilai banyak perubahan yang sangat signifikan terkait penyelenggaraan KLA di Kabupaten Serang," terangnya.

Menurutnya, penghargaan KLA Madya tidak lepas dari dukungan Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah, organisasi perangkat daerah, dan sejumlah pihak yang terlibat. "Alhamdulillah sesuai harapan Kabupaten Serang naik peringkat dari pratama menjadi madya. Tidak terlepas juga sinergi media massa, dunia usaha dan lainnya," ungkap Tarkul. ● **pra**

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

KUNJUNGAN KERJA MENDAG DI KABUPATEN BANDUNG

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berbincang dengan warga saat meninjau harga kebutuhan pokok di Pasar Tradisional Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (25/7). Dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Bandung, Menteri Perdagangan meninjau harga kebutuhan pokok di pasar tradisional serta meninjau implementasi program digitalisasi pasar rakyat.

Pengusaha Diminta Bangun Jalan Khusus Tambang di Kab. Bogor

Kami mengetuk hati para pengusaha tambang terutama di tiga kecamatan Rumpin-Cigudeg-Parungpanjang Kabupaten Bogor, untuk masuk dalam konsorsium bersama PT. Jasa Sarana dan ikut membiayai pembangunan jalan khusus tambang," ucap Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Mochamad Ichsan.

BOGOR (IM)- Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat asal PKS, Mochamad Ichsan mengetuk hati pengusaha tambang di Kabupaten Bogor untuk membangun jalan khusus tambang.

Hal itu karena rencana pembangunan jalan khusus tambang, terkendala karena belum adanya investor jalan khusus tambang sepanjang 12,9 Km tersebut, yang meliputi

Kecamatan Rumpin-Cigudeg-Parungpanjang Kabupaten Bogor.

"Kami mengetuk hati para pengusaha tambang terutama di tiga kecamatan tersebut, untuk masuk dalam konsorsium bersama PT. Jasa Sarana dan ikut membiayai pembangunan jalan khusus tambang," ucap Mochamad Ichsan kepada wartawan, Senin (25/7).

Mochamad Ichsan me-

nuturkan, bahwa para pengusaha tambang sejatinya sudah untung selama puluhan tahun selama menambang di Bumi Tegar Beriman, jangan sampai antara mereka dengan Pemprov Jawa Barat adu kuat.

"Jangan sampai saling adu kuat, lalu Pemprov Jawa Barat memberikan rekomendasi agar izin usaha tambang mereka dicabut (oleh pemerintah pusat). Saya juga melihat, proyek pembangunan jalan khusus tambang baka 1 menguntungkan karena jalan khusus tambang tersebut berbayar," tutur alumni Politeknik Negeri Bandung tersebut.

Politisi PKS itu menerangkan akibat tidak adanya jalan khusus tambang, tidak hanya menyebabkan jalan Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat di wilayah barat sering mengalami kerusakan, tetapi juga menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas dan

tingginya angka masyarakat yang terjerkit inspeksi saluran peenapasan atas (ISPA).

Dari informasi yang di-himpun, rencana pembangunan jalan khusus tambang bakal menelan biaya hingga Rp 400 miliar, jalan tersebut akan terkoneksi dengan jalan tol Jakarta Outing Ring Road (JORR) 3.

Selain jadi solusi permasalahan sosial yang ada selama ini, diyakini proyek tersebut bakal profitable atau menguntungkan para investornya.

Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Jawa Barat, Bambang Tirtoyuliono memaparkan bahwa rencana pembangunan jalan khusus tambang akan dikoneksikan dengan Jalan Tol JORR 3 atau yang menghubungkan Sentul-Parung-Rumpin-Serpong atau Jalan Tol di Kota Tangerang Selatan.

"Jalan khusus tambang akan dikoneksikan dengan

JORR 3 dan ke Kota Tangerang Selatan. Kami berencana di Tahun 2023 mendatang, jalan khusus tambang tersebut bisa segera dioperasikan," papar Bambang Tirtoyuliono.

Mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) ini menambahkan nilai investasi Rp 400 miliar terbilang kecil, jika dibandingkan dengan keuntungan yang didapatkan.

"Usia usaha tambang di Kecamatan Cigudeg, Rumpin dan sekitarnya bisa mencapai 46 tahun lagi dan bisnis plant jalan khusus tambang ini sangat menarik para investor karena bakal menguntungkan dan bisa balik modal dalam kurun waktu 4 tahun, sementara total biaya investasi untuk pembebasan lahan dan pembangunan jalan khusus tambang hanya sekitar Rp 400 miliar," tambahnya. ● **gio**

Bakesbangpol Bina Ormas Agar Mandiri dan Bermanfaat Bagi Masyarakat

BOGOR (IM)- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Bogor mengadakan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan (Ormas) tahun 2022, Senin (26/7) siang. Diharapkan Ormas Kota Bogor dapat menjalankan tugas pokoknya sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat.

Kepala Bakesbangpol Kota Bogor, Dadang Sugriarta mengatakan, kegiatan ini merupakan lanjutan bina ormas ditahun 2021, kemarin pihaknya mengadakan 10 kali pertemuan. Jadi ketua, sekretaris, bendahara dan divisi-divisi harus mengetahui tentang bidang nya ormas masing-masing dan tentang program juga kegiatan ormas-ormas.

"Jadi terukur oleh masing-masing ormas dan tahun ini cara mengukurnya dengan membuat Indeks Kinerja Ormas (IKO). Jadi ormas itu harus terukur sehingga bisa dinilai dan pemerintah wajib hadir," ungkap Dadang Sugriarta.

Dadang melanjutkan, selian itu pemerintah wajib membantu atau memfasilitasi dan menghargai ormas dalam

melakukan kegiatan pada bidang masing-masing. Jadi bisa diukur oleh IKO ormas-ormas yang ada di Kota Bogor.

"Total jumlahnya ada 210 ormas, karena kami membuka peluang tidak boleh dihalangi masyarakat mendirikan ormas. Sehingga wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota Bogor bisa terealisasi. Ujungnya kami berharap ormas Kota Bogor menjadi ormas mandiri, partisipatif dan ormas yang bermartabat," terangnya.

Dadang membeberkan, besar harapan dirinya ormas itu disenangi masyarakat dan mempunyai banyak manfaat bagi masyarakat. Untuk cara partisipatif ormas yang ada di Kota Bogor, yaitu dalam ormas itu ada akta pendirian, maka sesuai itu difokuskan dengan bidang berdirinya ormas.

"Tugas pokoknya dari masing-masing ormas fokuskan. Nanti di cluster tidak hanya dipegang Kesbangpol dan sinergitas dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, bahkan dengan instansi lainnya. Contohnya ormas yang membidangi pemberdayaan perempuan dan anak,

maka di fasilitasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A), ormas yang membidangi ekonomi diarahkan ke Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM (Disperindagkop UMKM), ormas yang membidangi kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) dan ormas bidang lingkungan hidup difasilitasi oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH)," beber Dadang.

Dadang menjelaskan, jadi sesuai tujuan ormas masing-masing, sehingga tahun 2022 ini dengan IKO bisa berhasil memberdayakan ormas. Kemudian dilakukan evaluasi dan monitoring (Monev) di bulan Desember 2022, nanti digelar produk ormas yang bukan berupa barang. Jadi hasil kinerja mereka selama satu tahun di ekspos kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

"Jadi pemerintah wajib hadir juga menghargai keberadaan ormas sehingga visi misi kami membentuk ormas yang mandiri, partisipatif dan bermartabat bisa terwujud," pungkasnya. ● **pra**

DAFTARKAN CITAYAM FASHION WEEK KE HAKI Ridwan Kamil Beri Nasihat untuk Baim Wong

BANDUNG (IM)- Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memberikan nasihat soal Baim Wong yang mendaftarkan Citayam Fashion Week sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) ke Kementerian Hukum dan HAM.

Ridwan Kamil menilai tidak semua bisa dilihat dari sisi komersial, termasuk fenomena Citayam Fashion Week yang saat ini tengah tren di masyarakat.

Menurut Ridwan Kamil fenomena Citayam Fashion Week berawal dari gerakan yang tumbuh kembangnya juga harus natural. Ridwan Kamil berpendapat jika fenomena seperti Citayam Fashion Week diformalkan dan dimewahkan akan hilang maksud dan tujuannya.

"Sekalinya diformalkan dan dimewahkan, apalagi oleh orang luar, malah akan hilang tujuan dan maksudnya. Dan biasanya gerakannya malah akan mati muda," kata Ridwan Kamil.

"Biarkan ini jadi cerita, bahwa fashion jalanan tetap adanya di jalanan. Bukan di sarinah, bukan di podcast, bukan pula harus menginternasional," lanjutnya.

Selain itu, menurut Ridwan

Kamil para remaja yang turut memeriahkan Citayam Fashion Week tersebut hanya butuh ruang untuk mengekspresikan diri.

"Tidak perlu negara turut campur terlalu jauh. Tidak perlu pula individu2 di luar komunitasnya ikut-ikutan mengatur-ngatur. Jikapun ingin diorganisasikan lebih baik, biarlah mereka sendiri yang mengurusnya melalui komunitasnya. Oleh mereka bukan anda," jelasnya.

Terakhir, Ridwan Kamil menyarankan agar Baim Wong membatalkan pendaftaran HAKI merek Citayam Fashion Week yang sempat menjadi trending di media sosial.

"Anda dan istri sudah hebat punya kerja2 luar biasa. Lanjutkan. Tapi bukan untuk inisiatif yang ini. Saran saya, pendaftaran HAKI ke Kemenkumham dicabut saja. Terima kasih jika bisa memahaminya. Hatur Nuhun," tutup Ridwan Kamil.

Diberitakan sebelumnya, Baim dan Paula mendaftarkan Citayam Fashion Week ke HAKI. Hal itu pun langsung mendapat kritikan dari netizen. Cuitan tentang Citayam Fashion Week pun sempat trending di media sosial Twitter. ● **pra**

Diterjang Hujan dan Angin, Dua Pohon Besar di Bogor Tumbang

BOGOR (IM)- Dua pohon dari lokasi berbeda di Kota Bogor, tumbang. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka, hanya arus lalu lintas sempat terganggu.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Teofilo Patocinio Freitas mengatakan lokasi pohon tumbang pertama di Jalan Raya Cilebut dini hari tadi. Pohon itu tumbang dengan tinggi 10 meter dan diameter 20 centimeter. "Tumbang lalu melintang di atas jalan raya sehingga membahayakan pengendara yang akan melintas," kata Teo dalam keterangannya, Senin (25/7).

Petugas lalu mendapat laporan langsung menuju lokasi untuk memotong pohon yang tumbang. Sekira pukul 09.35 WIB, batang pohon

jenis kicopong yang tumbang berhasil disingkirkan dari badan jalan. "Pohon tumbang karena hujan deras dan angin kencang," jelasnya.

Lokasi kedua, lanjut Teo, berada di Jalan Soleh Iskandar. Pohon jenis beringin dengan tinggi 15 meter dan diameter 30 centimeter itu tumbang menimpa kabel optik serta menutup sebagian badan jalan. "Pohon ini tumbang akibat kondisi pohon yang sudah tua dan akar pohon yang sudah lapuk," tambahnya.

Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam dua kejadian pohon tumbang tersebut. Assesmen dan pemotongan sudah selesai dilakukan oleh petugas. "Penanganan pemotongan pohon tumbang telah selesai dilakukan," pungkasnya. ● **gio**



IDN/ANTARA

PERINGATAN HARI HUTAN HUJAN SEDUNIA

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum (tengah) menanam pohon mangifera indica di Pondok Pesantren Baitul Hidayah, Desa Mandalamekar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (25/7). Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pondok Pesantren Baitul Hidayah melakukan penanaman pohon mangifera indica serta melepaskan burung hantu dalam rangka peringatan Hari Hutan Hujan Sedunia.